

SBY-Boediono Tetapkan Target Sejalan Kondisi Global

Pande Radja Silalahi, Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Jumat, 29 Mei 2009

JAKARTA (Suara Karya): Target pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono untuk merealisasikan visi ekonominya memang terbilang datar dibanding pasangan lain.

Namun, keduanya bertekad, target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada 2014 ditetapkan berdasarkan kondisi perekonomian dunia yang masih dalam tahap pemulihan pascacrisis global.

Pasangan ini tentu saja tidak akan menjauh dari sistem ekonomi kapitalis yang ramah pasar. Sebab, pasar dalam perekonomian kapitalis saat ini merupakan daya dorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pernyataan ini disampaikan ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pande Radja Silalahi, ekonom yang juga peneliti pada Pusat Studi Kesejahteraan Sosial Binny Buchori, serta ekonom dari Standard Chartered Bank Fauzi Ikhsan. Keduanya mengemukakan pandangan secara terpisah di Jakarta, Kamis (28/5).

"Pada situasi krisis saat ini, bukan hal mudah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jadi, saya pikir angka pertumbuhan 7 persen di 2014 nanti sangat masuk akal," ujar Pande.

Meski demikian, menurut dia, ada kemungkinan bagi pasangan capres-cawapres mewujudkan angka pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen jika benar-benar mampu mendorong pengembangan ekonomi. Namun, lanjut dia, jika ada pasangan capres-cawapres yang menyatakan bisa menciptakan pertumbuhan hingga double digit, tentunya sulit dipercaya karena untuk mencapai angka itu dibutuhkan terobosan besar-besaran dari sisi program pemberdayaan maupun dukungan pembiayaan.

"Mungkin target pertumbuhan bisa mereka capai dengan jalan berutang atau memacu sektor industri dan pertanian," ujarnya.

Saat ini, menurut dia, janji "manis" para calon pemimpin memang cukup menyejukkan hati rakyat, tetapi tidak boleh menyesatkan. Bagi Pande, rakyat berhak mengkritisi paparan visi ekonomi yang diusung masing-masing pasangan capres dan cawapres sehingga dapat memahami aspirasi masyarakat secara nyata.

Dia juga mengaku optimistis terhadap pasangan capres-cawapres yang memiliki latar belakang pemikiran ekonomi yang bisa diandalkan. Sosok Boediono yang merupakan ahli ekonomi dan pernah menduduki berbagai jabatan di kementerian ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia.

Sosok Boediono sampai saat ini, menurut berbagai analis, pengamat, dan pelaku pasar, mampu membangun kepercayaan. Dengan kata lain, Boediono merupakan sosok yang diterima pasar. Pasar bereaksi positif ketika Boediono baru saja diangkat menjadi menteri perekonomian layaknya tangan-tangan tak terlihat.

Pande juga menegaskan, bentuk keberpihakan dan perlindungan kepentingan rakyat kecil merupakan hal yang paling utama untuk dipenuhi masing-masing pasangan capres dan cawapres. Misalnya, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus dilakukan secara konsisten, tidak hanya sekadar menghitung di atas kertas. Sebab, penopang utama perekonomian mayoritas masyarakat Indonesia yakni sektor informal yang selama ini terpinggirkan.

"Andai saja ada kebijakan yang konsisten untuk memajukan sektor informal, kemajuan yang dicapai Indonesia akan sangat berkualitas. Apalagi sektor riil jelas-

jelas membutuhkan campur tangan positif dari pemerintah. Jadi, berilah janji yang bisa diimplementasikan jika terpilih menjadi pemimpin Indonesia pada Pilpres Juli 2009," tuturnya.

Selain itu, dia juga mengimbau pemerintahan mendatang memperkuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat. "Kredit usaha rakyat (KUR), bantuan langsung tunai (BLT), dan beberapa kebijakan lain harus lebih ditingkatkan nantinya dan dapat diimplementasikan dengan baik," kata Pande.

Menurut Fauzi Ikhsan, dengan kondisi ekonomi saat ini dan berbagai tantangan yang dihadapi, target maksimal pertumbuhan ekonomi yang dicapai sampai 2014 hanya tujuh persen.

"Pertumbuhan tujuh persen sampai akhir 2014 saja sudah bagus. Karena itu, memang perlu kerja keras dan lebih serius untuk menopang pertumbuhan yang berkualitas," ujarnya.

Sementara itu, Binny Buchori memastikan praktik ekonomi yang diemban cawapres pendamping SBY, Boediono, tidak lain adalah neoliberal. Sangat sulit bagi pasangan ini untuk membantahnya karena indikator-indikator kebijakan ekonomi semuanya neoliberal.

"Jangan membalikkan fakta karena sulit mengatakan ekonomi yang diemban pemerintah SBY tidak neoliberal. Sulit menerima pernyataan pasangan itu," ujar dia. Binny menegaskan, contoh-contoh dari sejumlah perundang-undangan yang dibuat belum sepenuhnya mencerminkan kepedulian terhadap kepentingan nasional. Misalnya, pengetatan anggaran serta kebijakan defisit anggaran yang ditekan sekecil-kecilnya, di tengah kesulitan rakyat akan bahan pangan dan kebutuhan lainnya.

Pemerintah, menurut dia, menjual aset negara kepada asing karena peraturan yang dibuat sangat terbuka sehingga banyak aset dimiliki asing. Padahal, di antara aset-aset itu, menurut UUD 1945, tidak bisa dimiliki asing. Pemerintah sebenarnya juga telah menyalahi konstitusi.

Indikator lain yang menggambarkan ekonomi neoliberal, kata Binny, adalah harga kebutuhan pokok masyarakat selalu naik dan makin sulit terjangkau orang banyak. "Juga berbagai fasilitas umum dan sosial makin sulit. Orang menjerit karena fasilitas umum yang sudah sangat komersial. Padahal, hal itu harus menjadi urusan negara, tidak dikomersialkan," ucapnya.

Dia menegaskan, pasangan SBY-Boediono boleh saja mengaku tidak neoliberal, tetapi kebijakan dan pasar bebas yang diterapkannya tidak mendukung pengakuan itu. Kalaupun ada kebijakan yang pro rakyat, programnya melalui utang luar negeri.

"Program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) diperoleh dari utang sebesar 60 juta dolar AS. BLT (bantuan langsung tunai) itu program yang politis. Bukan program ekonomi dan tidak berkesinambungan. Lalu, mana yang dikatakan negara melakukan intervensi di pasar? Seharusnya, harga dikontrol agar tidak naik dan bisa memenuhi kebutuhan rakyat. Tetapi, mana kontrol tersebut?" kata Bini mempertanyakan.

Karena itu, lanjut dia, intervensi pemerintah harus bisa dibuktikan, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan vital rakyat. "Harga harus bisa ditekan, fasilitas sosial dan umum terjangkau oleh rakyat banyak. Peraturan pasar pun tidak memihak kepada pedagang kecil di pasar-pasar tradisional," katanya.

Di tempat terpisah, menanggapi kepemilikan asing terhadap badan usaha yang semula BUMN, ekonom M Chatib Basri mengatakan, isu terpenting dari privatisasi adalah bagaimana mengubah struktur pasar sehingga servis dan harga menjadi lebih baik bagi masyarakat.

"Kalau mengubah monopoli pemerintah jadi monopoli swasta, itu tidak ada gunanya karena harga tidak akan turun, servis tidak akan baik," katanya. (Bayu/Indra)